

**PERWUJUDAN ASAS KESEIMBANGAN ANTARA HAK, KEWAJIBAN
DAN TANGGUNG JAWAB DALAM KLAUSUL BAKU
PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN
(Studi kasus Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Antara PT. PLN (Persero)
Area Malang Dengan Kontraktor)**

**Ardhita Indrasari S.H., Dr. Rachmad Safa'at S.H., M.Si,
Dr. Bambang Winarno, S.H., S.U.**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono Nomor 169, Malang 65145. Telp (0341) 553898, FAX (0341)
566505
Email : sari.dhita90@gmail.com

Abstract

This research was conducted based on standard agreements applied to the contract agreement at PT. PLN (Persero) of Malang. The contract agreement was made in the form of standard agreement whose contents had been determined unilaterally by PT. PLN (Persero) of Malang as the party whose position was stronger in the agreement so as it made PLN more profitable than the contractor as a weak position in the agreement, while very room for negotiation was limited.

This study used descriptive analytical research located at PT. PLN (Persero) of Malang. Primary data and secondary data were obtained through field studies by using direct interview to the respondents, the study of literature and the documents reviewers of contract agreement.

The result showed that the contract agreement studied was PT. PLN (Persero) of Malang as the employer and the contractor still had not properly implemented the legislation in particular the Law No. 8 Year 1999 concerning Consumer Protection and the Law No. 18 Year 1999 concerning Construction Services, resulting in imbalance between the rights and the obligations of the parties and the lack of legal protection of the weaker party; in this case was the contractor.

In order to manifest the principle of balance in the contract agreement to run in fair, transparent, non-discriminatory ways, it needed the existence of a notary as the Independence party and the form of contract agreement should be made in writing to the notary deed.

Key words: contract agreement, contractor, principle of balance

Abstrak

Penelitian ini dilakukan atas dasar perjanjian baku yang diterapkan pada perjanjian pemborongan pekerjaan di PLN Malang. Perjanjian pemborongan pekerjaan dibuat dalam bentuk perjanjian baku yang isinya telah ditentukan sendiri secara sepihak oleh PLN Malang sebagai pihak yang kedudukannya lebih kuat dalam perjanjian sehingga sifatnya lebih menguntungkan PLN daripada kontraktor sebagai pihak yang lemah kedudukannya dalam perjanjian, sementara ruang untuk negosiasi sangat minim. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perwujudan asas keseimbangan dalam klausul baku perjanjian

pemborongan pekerjaan antara PLN Malang dengan kontraktor yang memiliki posisi yang lemah dibandingkan pihak PLN Malang.

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan lokasi penelitian di PLN Malang. Data primer dan data sekunder diperoleh melalui studi lapangan dengan mempergunakan pedoman wawancara langsung terhadap responden, studi kepustakaan dan penelaah dokumen-dokumen perjanjian pemborongan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pemborongan yang diteliti yaitu PLN Malang selaku pihak pemberi kerja dan pihak kontraktor masih belum melaksanakan dengan baik perundang-undangan yang mengatur khususnya UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, sehingga mengakibatkan tidak terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dan kurangnya perlindungan hukum pihak yang lemah dalam hal ini kontraktor.

Agar terwujud asas keseimbangan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan dapat berjalan dengan adil, transparan, tidak diskriminatif, maka perlu adanya seorang notaris sebagai pihak yang Independen dan mengenai bentuk perjanjian pemborongan pekerjaan sebaiknya dibuat secara tertulis dengan akta notariil.

Kata kunci: Perjanjian pemborongan pekerjaan, kontraktor, asas keseimbangan.

Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang, saat ini menitikberatkan pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur di bidang ketenagalistrikan. Mengingat skala kebutuhan tenaga listrik nasional yang semakin besar dan terbatasnya kemampuan PT. PLN (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara, maka PT. PLN (Persero) tidaklah mungkin menjalankan pembangunan dengan sendirinya untuk pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, untuk itu diundanglah para rekanan atau kontraktor guna menyediakan atau mengadakan barang atau jasa. Kontraktor tersebut diseleksi dan dipilih melalui prosedur dan tata cara yang berlaku dengan ketentuan Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 0527.K/DIR/2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0620.K/DIR/2013 Tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Persero) yang sebelumnya menggunakan Keputusan Direktur Utama PT. PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Persero) yang sudah diubah sebanyak 10 (sepuluh) kali untuk menyesuaikan dengan *good practice* dalam pengadaan. Sedangkan ketentuan umum tentang proses pengadaan barang dan jasa di PT. PLN (Persero) berdasarkan pada Edaran Direksi PT. PLN (Persero) Nomor

00014.E/DIR/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Persero).

Pelaksanaan dari pembangunan tersebut di samping dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) tetapi juga melibatkan pihak kontraktor atau pemborong. Hubungan kerja sama dalam melaksanakan pembangunan tersebut dilakukan dalam bentuk pemborongan pekerjaan, karena dengan menggunakan sistem pemborongan ini dirasakan akan lebih efektif dan efisien untuk mempercepat dalam mengadakan pembangunan yang diperlukan.

Hubungan kerja antara PT. PLN (Persero) dengan kontraktor dalam pelaksanaannya tentunya di dasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak tersebut merupakan serangkaian kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri. Untuk itu dalam prakteknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.

Pelaksanaan dalam penyediaan dan pengadaan barang atau jasa di PT. PLN (Persero) Area Malang, maka akan melibatkan berbagai pihak seperti pemberi pekerjaan/pengguna jasa dan pemborong dalam melaksanakan pekerjaan. Oleh sebab itu, masing-masing pihak memiliki hubungan hukum yang akan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yaitu perjanjian pemborongan pekerjaan. Pemborongan pekerjaan antara di PT. PLN (Persero) Area Malang dengan kontraktor biasanya lebih sering dilakukan dengan tender.

Perjanjian pemborongan pekerjaan yang diatur dalam KUHPdata BAB VII A merupakan bagian dari perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan. Perjanjian Pemborongan diatur dalam pasal 1601 huruf b KUHPdata yang menyatakan bahwa perjanjian pemborongan pekerjaan adalah suatu perjanjian antara pihak yang memborongkan pekerjaan dengan pihak yang melaksanakan pekerjaan tersebut, dimana pihak yang pertama menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan, atas pembayaran sejumlah uang sebagai harga borongan.¹ Namun pengertian perjanjian pemborongan tersebut belum tepat menganggap bahwa perjanjian pemborongan adalah perjanjian sepihak sebab si pemborong hanya mempunyai kewajiban saja, sementara yang

¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 58.

memborongkan hanya hak saja. Sebenarnya perjanjian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian timbal balik antara hak dan kewajiban.²

Perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat oleh di PT. PLN (Persero) Area Malang merupakan perjanjian yang dibakukan. Dimana suatu kontrak telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak yang memborongkan pekerjaan dan pihak kontraktor hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Klausul standar atau baku dipandang lebih efisien dari sisi waktu dan biaya tetapi kurang melindungi kepentingan salah satu pihak terutama pihak kontraktor.

Adanya klausul baku ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut karena ada beberapa klausul yang dianggap dapat merugikan pihak kontraktor, salah satunya masalah pemenuhan prestasi. Pada dasarnya masih ada beberapa hal dalam klausul-klausul tersebut yang betul-betul harus ditegaskan. Banyak kasus yang terjadi, dimana pihak kontraktor dituntut oleh di PT. PLN (Persero) Area Malang karena melakukan wanprestasi. Padahal dalam kenyataannya tidak hanya pihak kontraktor yang memungkinkan melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan pekerjaannya, bahkan pihak pengguna jasa konstruksi yaitu di PT. PLN (Persero) Area Malang tidak jarang melakukan wanprestasi, misalnya dalam hal keterlambatan pembayaran prestasi yang telah dilaksanakan oleh pihak kontraktor secara tepat waktu dan tanpa cacat.

Di sisi lain, perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut tidak dibuat dalam akta otentik tetapi hanya dibuat dengan akta di bawah tangan. Perlindungan hukum terhadap perjanjian pemborongan yang dibuat di bawah tangan tidak menjamin kepastian hukum karena kebenaran isi akta hanya merupakan tanggung jawab kedua belah pihak tanpa disaksikan pejabat yang berwenang, sehingga kekuatan pembuktiannya lemah.

Dari tinjauan Hukum Perdata, perjanjian yang dibuat dengan akta di bawah tangan mengikat para pihak sepanjang isi dan tanda tangannya diakui oleh para pihak tersebut. Kontrak pengadaan mempunyai kekuatan yang sah dan mengikat jika kontrak itu ditandatangani oleh pejabat yang mempunyai kapasitas

² Djumialdji, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 4.

untuk itu.³ Dari uraian latar belakang tersebut adapun rumusan masalah dalam jurnal penelitian ini yaitu

1. Bagaimana perwujudan asas keseimbangan antara hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam klausul baku perjanjian pemborongan pekerjaan di PT. PLN (Persero) Area Malang?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam klausul baku perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat oleh PT. PLN (Persero) Area Malang?
3. Bagaimana formasi klausul baku yang seharusnya dibuat dalam perjanjian pemborongan pekerjaan agar terjadi keseimbangan antara hak, kewajiban dan tanggung jawab di PT. PLN (Persero) Area Malang?

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengkaji mengenai perwujudan asas keseimbangan antara hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam klausul baku perjanjian pemborongan pekerjaan antara PT. PLN (Persero) Area Malang dengan kontraktor serta perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian pemborongan pekerjaan.

Metode pendekatan yang digunakan yaitu secara yuridis sosiologis. Penelitian sosiologis ini dilakukan dengan cara memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.⁴ Metode pendekatan tersebut digunakan dalam penelitian mengenai kajian yuridis atas klausul baku perjanjian pemborongan pekerjaan antara PT. PLN (Persero) dengan pihak kontraktor. Karena permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini membutuhkan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisa untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang muncul dari penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan di kantor PT. PLN (Persero) Area Malang. Alasan dipilihnya lokasi tersebut karena PT. PLN (Persero) Area Malang adalah pihak yang membuat perjanjian pemborongan dengan kontraktor.

³ Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah Jilid I*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009), hlm. 107.

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 34.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau diterima secara langsung di lapangan atau narasumber utama. Data primer dalam penelitian ini menggunakan wawancara yang diperoleh dari para responden yang menjadi narasumber data dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, bahan hukum dan dokumen-dokumen hukum lainnya seperti peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan tambahan untuk menganalisis data primer.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian penulisan jurnal tesis ini yaitu pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian di lapangan melalui wawancara. Wawancara ditentukan terhadap beberapa orang yang telah ditentukan menjadi sampel dalam penelitian ini.

Sifat wawancara adalah wawancara terbuka, yaitu wawancara yang subjeknya mengetahui maksud dan tujuan dari wawancara yang ditujukan kepada subjek yang dituju. Adapun narasumber wawancara antara lain pejabat pengadaan barang dan jasa PT. PLN (Persero) Area Malang dan beberapa direktur kontraktor di kota Malang yang melakukan perjanjian pemborongan pekerjaan di PT. PLN (Persero) Area Malang.

Penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yaitu Dalam penelitian ini penelusuran dokumen dilakukan melalui pengamatan dan analisis terhadap perjanjian pemborongan yang dibuat oleh PT. PLN (Persero) Area Malang. Adapun objek yang diteliti yaitu klausul baku perjanjian pemborongan pekerjaan antara PT. PLN (Persero) Area Malang dengan kontraktor.

Variabel yang dinilai dalam merumuskan *instrument* penelitian lapang yaitu antara lain:⁵

- 1) Sistematika dan struktur perumusan
- 2) Pilihan dalam menggunakan alat
- 3) Perumusan pertanyaan-pertanyaan penelitian sesuai dengan data yang dicari dalam penelitian lapang

⁵ Rachmad Syafa'af, *Strategi Penelitian dan Penyusunan Penulisan Ilmu Hukum*, (Malang: Setara Press, 2008), hlm. 82.

- 4) Merumuskan pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian lapang sesuai dengan kedudukan dan kapasitas responden dan informan kunci yang di wawancara
- 5) Kerapihan tata letak penyusunan, ketepatan dalam penggunaan bahasa Indonesia baku.

Analisa data merupakan suatu tahapan yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang mendekati kebenaran yang ada. Dalam penulisan tesis ini digunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah dikumpulkan diolah dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang efektif dan logis sehingga peneliti dapat dengan mudah menginterpretasikan hasil pengolahan data.⁶

Pembahasan

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, maka hasil yang ditemukan yaitu:

A. Perwujudan Asas Keseimbangan Antara Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Dalam Klausul Baku Perjanjian Pemborongan Pekerjaan di PT. PLN (Persero) Area Malang

Dalam berbagai kajian akademis, perbincangan mengenai eksistensi perjanjian (hukum perjanjian) dalam hubungannya dengan para pihak acap kali dikaitkan dengan “keseimbangan dalam berkontrak” (asas keseimbangan). Namun demikian, seakan tidak pernah hentinya muncul anggapan bahwa perjanjian yang terjalin antara pihak-pihak tidak memberikan keseimbangan posisi bagi salah satunya. Perjanjian yang demikian dianggap tidak adil dan berat sebelah, sehingga memunculkan upaya untuk mencari dan menggali temuan-temuan baru di bidang hukum perjanjian agar dapat menyelesaikan problematika ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual.⁷

Problematika mengenai perjanjian pemborongan pekerjaan yang sedang marak akhir-akhir ini adalah perjanjian pemborongan pekerjaan yang pengguna jasanya adalah PT. PLN (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kaitannya dengan tindakan hukum dalam perjanjian tersebut berada di ranah hukum publik atau privat.

⁶ Winarno Surachmad, *Dasar dan Tehnik Research: Penelitian Metodologi Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1973), hlm. 127.

⁷ Agus Yudha Hernoko, *Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta: Laksbang Mediantama, 2008), hlm. 25.

Berbicara tentang keadilan dalam pemborongan pekerjaan, menunjukkan bahwa keadilan berkaitan secara timbal balik bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Tidak hanya dalam pengertian bahwa terwujud keadilan akan menciptakan stabilitas sosial yang akan menunjang kegiatan pemborongan pekerjaan melainkan juga dalam pengertian bahwa sejauh prinsip keadilan dijalankan akan lahir etos kerja yang lebih baik di PLN Malang. Sebaliknya, ketidakadilan akan menimbulkan gejolak sosial yang meresahkan para pelaku bisnis.⁸

Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls bertitik tolak pada tema Posisi Asali yaitu status *quo* awal yang menegaskan bahwa kesepakatan fundamental yang dicapai adalah *fair*.⁹ Semua orang mempunyai hal yang sama dengan prosedur memilih prinsip; setiap orang bisa mengajukan usulan, menyampaikan penalaran mereka, dan lain-lain.¹⁰

Dalam kaitan dengan aturan pengadaan barang/jasa oleh PLN, materi yang termuat di dalamnya sudah menunjukkan segi-segi yang substansial khususnya menyangkut standar dalam pengaturan syarat dan ketentuan yang harus dituangkan dalam perjanjian, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0527.K/DIR/2014 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Persero), yang di dalamnya dituangkan pula mengenai syarat-syarat umum perjanjian dan syarat-syarat khusus perjanjian dalam pengadaan barang/jasa PLN.

Perwujudan asas keseimbangan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan di PLN sangat diperlukan untuk mewujudkan perjanjian yang saling menguntungkan satu sama lain. Namun terkadang dalam kenyataannya, hal tersebut tidak diterapkan, seperti halnya hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perjanjian pemborongan pekerjaan di PLN, ternyata ada beberapa klausul yang tidak seimbang dan dapat merugikan pihak kontraktor. Klausul tersebut terdapat pada Bab VII manajemen pelaksanaan perjanjian/kontrak tentang hak dan kewajiban para pihak yang menyebutkan bahwa pihak pengguna barang/jasa

⁸ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 138.

⁹ John Rawls, *A Theory of Justice: Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 19.

¹⁰ Agus Yudha Hernoko, *op.cit.*, hlm. 21.

dalam hal ini adalah PLN berhak mengenakan denda keterlambatan apabila pihak kontraktor terlambat melaksanakan pekerjaannya sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.

Ketika pihak penyedia barang/jasa dalam hal ini adalah pihak kontraktor yang terlambat menyelesaikan pekerjaannya, dendanya dipotong langsung dari pembayaran terakhir yang dilakukan oleh PLN. Tetapi, ketika PLN yang terlambat membayarkan prestasinya, pihak penyedia hanya menunggu sampai haknya terpenuhi entah sampai kapan. Hal ini terjadi karena belum ada juga dari pihak kontraktor yang menggugat pihak PLN dengan mengajukan data-data penunjang seperti apa yang telah diatur dalam perjanjian pemborongan pekerjaan. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan pihak kontraktor mengenai peraturan ataupun perundang-undangan mengenai perjanjian pemborongan pekerjaan. Tetapi apabila terjadi keterlambatan pembayaran untuk pekerjaan yang telah diselesaikan oleh kontraktor, hal itu bukan sepenuhnya kesalahan pihak PLN karena keterlambatan tersebut disebabkan oleh kosongnya keuangan PLN Distribusi Pusat.

Selain itu, pihak kontraktor juga berpendapat mengenai penerapan asas keseimbangan bahwa sudah merupakan rahasia umum sebenarnya mengenai ketidakseimbangan yang kadang terjadi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan. Apalagi bukan masalah besar bagi PLN ketika rekanannya tidak setuju dengan isi perjanjian pemborongan karena masih banyak rekanan yang lain. Ketika kontraktor tidak setuju dengan isi perjanjian pemborongan pekerjaan, maka PLN akan mencari kontraktor yang lain yang setuju karena tidak memungkinkan bagi PLN untuk mengubah isi perjanjian. Selain itu, sistem birokrasi juga merupakan pengaruh penting dalam hal tersebut. Peraturan-peraturan yang ada harus diberlakukan secara tegas dan disiplin sehingga tidak ada lagi celah bagi PLN maupun kontraktor untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan yang melanggar peraturan terkait pengadaan barang/jasa, serta tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan pihak PLN maupun kontraktor terkhusus untuk masalah pembayaran. Seharusnya penyedia jasa konstruksi dan pejabat-pejabat yang berkaitan dengan perjanjian pemborongan pekerjaan harus berintegritas tinggi dan bekerja secara profesional.

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi ketidakseimbangan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan di PLN Malang yaitu:

- a. Standarisasi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan
- b. Adanya klausul eksonerasi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan
- c. Banyaknya saingan perusahaan kontraktor di kota Malang
- d. Keterlambatan atau ingkar membayar prestasi oleh PLN Malang
- e. Peran notaris tidak dilibatkan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan

B. Bentuk Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Klausul Baku Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang yang dirugikan orang lain karena adanya tindakan penyelewengan terhadap hak-hak tersebut, akan tetapi perlindungan hukum tersebut tidak semata diberikan kepada seseorang yang telah dirugikan saja tapi juga kepada seluruh masyarakat.

Untuk itu, dalam menganalisis dan memberikan alternatif solusi mengenai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian baku pemborongan pekerjaan di PT. PLN (Persero) Area Malang, penulis tidak hanya melihat dari satu sisi saja yaitu kontraktor atau pihak penyedia jasa, mengingat meskipun pihak kontraktor sebagai pihak dalam perjanjian mempunyai kedudukan yang lemah karena tidak memiliki posisi tawar sehingga hak-haknya dirugikan oleh pihak penyedia jasa, akan tetapi sebagai bagian dari masyarakat, PT. PLN (Persero) Area Malang juga mempunyai hak yang diberikan oleh hukum. Hukum harus bersifat objektif (tidak memihak) dengan menempatkan diri di tengah-tengah secara netral, karena PT. PLN (Persero) maupun kontraktor, keduanya merupakan subjek hukum yang harus dilindungi.

Sebagaimana telah di uraikan sebelumnya, kurangnya perlindungan hukum menjadi satu permasalahan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan di PT. PLN (Persero) Area Malang. Perkembangan dalam hal pekerjaan pemborongan sebagai suatu bentuk perjanjian bernama (*nominaat*) yang dikenal dalam KUHPerdara tetapi tidak di barengi dengan ketersediaan peraturan yang memadai tentang pemborongan pekerjaan. Hingga saat ini, belum ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai perjanjian pemborongan pekerjaan, sedangkan ketentuan

yang mengatur tentang perjanjian pemborongan pekerjaan di PT. PLN (Persero) masih dalam bentuk Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 0527.K/DIR/2014 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Persero) yang pengaturannya lebih bersifat administratif. Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) tersebut sudah memuat mengenai pengaturan hak dan kewajiban tetapi dalam perjanjian pemborongan PT. PLN (Persero) Area Malang tidak dicantumkan hak dan kewajiban tersebut, khususnya dalam hal apabila kontraktor sudah menjalankan kewajibannya sedangkan pihak PT. PLN (Persero) belum memenuhi prestasinya. Demikian juga dengan perlindungan hukum para pihak hanya sebatas itikad baik dari masing-masing pihak yang semuanya dituangkan dalam bentuk perjanjian pemborongan pekerjaan.

Berdasarkan analisis sub bab pembahasan sebelumnya yang menganalisis mengenai perwujudan asas keseimbangan dalam klausul baku perjanjian pemborongan pekerjaan di PT. PLN (Persero) Area Malang, dapat disimpulkan bahwa klausul-klausul yang tertuang dalam bentuk perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh pihak pemberi kerja atas dasar asas kebebasan berkontrak tersebut tidak mencerminkan asas keseimbangan bagi para pihak.¹¹

Terkait dengan wanprestasi yang dilakukan oleh PLN terhadap pihak kontraktor, terutama masalah keterlambatan pembayaran, sangat jarang ditemukan kasus dimana kontraktor menggugat pengguna jasa khususnya apabila pengguna jasanya adalah pihak instalasi atau pemerintahan.

Adapun faktor-faktor yang dianggap sebagai penyebab pihak kontraktor enggan menggugat PLN:¹²

- a. Adanya rasa saling percaya yang dimiliki oleh kontraktor dan PLN, bahwa pihak PLN mempunyai itikad baik dalam perikatan perjanjian yang telah sama-sama disepakati.
- b. Adanya rasa ketidakenakan kepada pihak PLN karena telah lama menjalin hubungan sebagai relasi dalam dunia jasa konstruksi.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Tentrem Subekti, selaku Direktur PT. Surya Gaya Dharmaputra, 30 Mei 2016.

¹² Wawancara dengan Bapak Irsyam Asri Putra, selaku SPV Pengadaan Barang dan Jasa PT. PLN (Persero) Area Malang, 01 Juni 2016.

- c. Nilai kontrak yang terkadang dianggap tidak seberapa jumlahnya juga menjadi salah satu faktor karena melakukan penggugatan bisa jadi membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
- d. Lamanya proses peradilan juga menjadi pertimbangan kontraktor untuk menggugat pihak PLN.
- e. Penyedia jasa khawatir apabila melayangkan gugatan, hal itu akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja mereka saat itu dan kedepannya.
- f. Wanprestasi yang kadang terjadi sudah dianggap hal lumrah dan menjadi kebiasaan di dalam dunia jasa konstruksi.
- g. Pembayaran prestasi dari pihak PLN yang kadang terlambat, dianggap sebagai salah satu resiko dari pekerjaan.
- h. Pihak kontraktor masih ada yang kurang memahami mengenai undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang terkait dengan jasa konstruksi.

Dengan adanya faktor-faktor yang dikemukakan oleh pihak kontraktor inilah yang menjadi acuan sehingga perlunya perlindungan hukum bagi pihak kontraktor maupun PT. PLN (Persero) Area Malang.

1. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Artinya ketentuan hukum dapat dihadirkan sebagai upaya pencegahan atas tindakan pelanggaran hukum. Upaya pencegahan ini diimplementasikan dengan membentuk aturan-aturan hukum yang bersifat normatif.

Bentuk perlindungan hukum preventif bagi para pihak terutama terhadap kontraktor dalam perjanjian pemborongan pekerjaan dapat diwujudkan dengan pengaturan ketentuan tentang penggunaan klausul baku khususnya dalam perjanjian pemborongan pekerjaan yang lebih rinci mengenai hakikat, karakter, pembagian hak dan kewajiban, dan seterusnya yang dituangkan dalam bentuk undang-undang, memberikan suatu wadah atau tempat berlindung bagi para pihak terutama terhadap pihak pemborong dari segala hal yang mengancam haknya adalah melalui pengaturannya melalui klausul-klausul yang dituangkan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan.

Perlindungan hukum preventif bagi PLN sebagai pihak pemberi kerja dalam memberikan pemborongan pekerjaan kepada kontraktor, oleh undang-undang sudah mendapatkan posisi yang aman dan sudah dilindungi dalam hal ini kepentingan-kepentingan dari perusahaan sendiri. Secara tegas sudah diatur dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdara dan UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Peraturan tersebut diatas sudah jelas untuk kepentingan PLN agar dapat melindungi dirinya dari cedera janji atau wanprestasi dari pihak kontraktor sangat kecil, karena adanya jaminan yang menjadi kewajiban bagi kontraktor. Walaupun terjadi cedera janji atau wanprestasi dari pihak kontraktor, maka pihak PLN masih mendapatkan perlindungan hukum.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu melalui pengadilan (upaya irigasi) dan alternatif penyelesaian sengketa (upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau upaya non litigasi).

Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap pihak kontraktor tertuang dalam perjanjian pemborongan pekerjaan mengenai amandemen atau addendum, yaitu:

Amandemen/Adendum kontrak adalah ketentuan mengenai perubahan kontrak. Perubahan perjanjian atau kontrak dapat dilakukan meliputi:¹³

- a. Perubahan volume/jenis pekerjaan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak;
- b. Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
- c. Perubahan jadwal pelaksana;
- d. Adanya perubahan ketentuan/peraturan yang berlaku;
- e. Adanya penyesuaian harga.

Bentuk perlindungan hukum selanjutnya bagi PLN adalah adanya Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan yang telah disetorkan sebelumnya oleh pihak kontraktor kepada PLN, apabila pihak kontraktor

¹³ Surat Edaran Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014 tentang *Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Persero)*.

tidak melakukan pemeliharaan bangunan pasca serah terima pekerjaan selama waktu yang telah ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Perjanjian.

Apabila terjadi perselisihan dalam rangka pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan di PT. PLN (Area) Malang dengan pihak kontraktor, maka para pihak berdasarkan klausul yang terdapat dalam perjanjian pemborongan pekerjaan sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Tinggi Malang.

Terkait dengan kasus yang sering terjadi antara PLN selaku pengguna jasa dengan kontraktor selaku penyedia jasa. Sebagai para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, mereka memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan ataupun perundang-undangan dan perjanjian yang telah disepakati bersama. Pemenuhan hak dan kewajiban merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak yang mengadakan perjanjian.

3. Peran Notaris Sebagai Solusi Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak

Salah satu permasalahan yang dimiliki oleh pranata hukum mengenai pemborongan pekerjaan khususnya pengadaan barang dan jasa adalah kurangnya perlindungan hukum bagi para pihak, karena sebagai sebuah pranata hukum yang *loosely regulated*, perlindungan hukum bagi para pihak hanya sebatas pada itikad baik dan masing-masing pihak yang semuanya dituangkan dalam bentuk klausul-klausul perjanjian pemborongan pekerjaan.

Djumialdji mengemukakan mengenai bentuk perjanjian pemborongan bentuknya bebas, artinya dapat dibuat dalam bentuk tertulis maupun lisan. Dalam praktek, apabila dalam perjanjian pemborongan pekerjaan menyangkut biaya yang besar biasanya perjanjian pemborongan dibuat secara tertulis, baik dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta otentik (akta notaris).¹⁴

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas terkandung suatu kewajiban untuk menuangkan setiap perjanjian pemborongan pekerjaan di PT. PLN

¹⁴ Djumialdji, *op.cit.*, hlm. 4.

(Persero) dalam bentuk tertulis, namun tidak ditentukan mengenai bentuk perjanjian tertulis tersebut dalam bentuk akta di bawah tangan atau akta otentik.

Kewajiban untuk menuangkan perjanjian pemborongan pekerjaan dalam bentuk tertulis tanda ada keharusan untuk menuangkannya dalam bentuk akta otentik, dikarenakan perjanjian pemborongan pekerjaan dan perjanjian umum lainnya bukan merupakan perjanjian formil, sehingga diberikan kebebasan dan segi bentuk. Perjanjian formil, undang-undang mensyaratkan selain harus memenuhi syarat umum untuk sahnya suatu perjanjian, baru sah apabila perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik.¹⁵

Dalam proses pembuatan perjanjian pemborongan pekerjaan di PT. PLN (Persero) Area Malang, Notaris dapat berperan sebagai pihak penengah antara pihak pemberi kerja yaitu PT. PLN (Persero) Area Malang dengan pihak kontraktor, sekaligus bertindak sebagai konsultan hukum bagi kedua belah pihak terutama bagi pihak kontraktor yang pada umumnya merupakan pihak yang kurang paham akan hukum dengan memberikan nasihat-nasihat hukum tentang klausul-klausul dalam suatu perjanjian pemborongan pekerjaan terutama terkait klausul eksonerasi serta menerangkan ketidakseimbangan antara para pihak serta resiko yang akan mereka hadapi sehingga dapat dihindarkan tindak penyalahgunaan klausul eksonerasi oleh pihak pemberi kerja dan dapat mewujudkan keseimbangan antara para pihak, serta hak kontraktor sebagai konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur sebagaimana di atur oleh ketentuan pasal 18 huruf c UU No, 8 Tahun 1999 terpenuhi. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dimana salah satu kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Pembuatan perjanjian pemborongan pekerjaan dalam bentuk akta notariil juga dapat mengatasi kekaburan norma dalam klausul-klausul

¹⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 50.

perjanjian pemborongan yang selama ini banyak menimbulkan permasalahan dan kerugian di pihak kontraktor karena salah satu kewajiban yang terkandung dalam kewenangan Notaris membuat perjanjian adalah membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 16 ayat (1) dan pasal 40 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014.

Ditinjau dari sudut hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia pasal 1870 KUHPdata menyatakan bahwa bukti yang paling kuat adalah bukti dalam bentuk Akta Otentik.¹⁶

Dengan kekuatan pembuktian formal oleh akta otentik dibuktikan bahwa pejabat yang bersangkutan menjamin kebenaran atau kepastian tangga dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir, demikian juga tempat dimana akta itu dibuat dan sepanjang mengenai akta partij, bahwa para pihak menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak sendiri.¹⁷

Dalam sebuah akta otentik terkandung kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materiil. Kekuatan pembuktian lahiriah memberikan kemampuan kepada akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemampuan ini menurut pasal 1875 KUHPdata tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan¹⁸ yang baru berlaku sah jika pihak yang menandatangani akta tersebut mengakui tanda tangannya.

Jadi, dalam rangka memenuhi tuntutan untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien dalam pengadaan barang dan jasa di PT. PLN (Persero) Area Malang tanpa mengabaikan perlindungan hukum bagi para pihak, maka perjanjian pemborongan pekerjaan tetap disajikan dalam bentuk perjanjian standar yang disiapkan terlebih dahulu oleh pihak PT. PLN (Persero) Area Malang, namun dengan dibuatnya perjanjian pemborongan

¹⁶ Sogar Simamora, *Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia)*. (Surabaya: Laksbang Justitia, 2013), hlm. 14.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 57.

¹⁸ Tobing.G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 55.

pekerjaan tersebut dalam bentuk model kontrak, bukan pejabat pengadaan barang dan jasa PT. PLN (Persero) yang melakukan penyusunan klausul-klausul perjanjian baku pemborongan pekerjaan tersebut, akan tetapi Notarilah yang menentukan dan melakukan penyusunan klausul-klausul perjanjian pemborongan pekerjaan berdasarkan pemahamannya mengenai hukum.

Mengingat kewajiban Notaris untuk tidak berpihak, diharapkan dengan disusunnya klausul-klausul perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut dalam bentuk model kontrak oleh Notaris akan lebih menjamin asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab dan asas keseimbangan sebagai upaya perlindungan bagi para pihak terutama bagi para kontraktor di kota Malang dalam perjanjian pemborongan pekerjaan di PT. PLN (Persero) Area Malang.

C. Formasi Klausul Baku Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum suatu kontrak dibuat menjadi suatu perikatan, maka muncullah asas-asas dalam hukum perjanjian yang merupakan pedoman atau patokan, batasan atau yang menjadi rambu dalam mengatur dan membentuk kontrak tersebut yang sudah penulis jelaskan pada sub bab tinjau pustaka. Tujuannya yaitu agar kontrak tersebut kelak pada akhirnya akan menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya atau pemenuhannya.¹⁹

Istilah pemborongan dan konstruksi mempunyai keterikatan satu sama lain. Istilah pemborongan memiliki cakupan yang lebih luas dari istilah konstruksi. Hal ini disebabkan karena istilah pemborongan dapat saja berarti bahwa yang dibangun tersebut bukan hanya konstruksinya, melainkan dapat juga berupa pengadaan barang saja, tetapi dalam teori dan praktek hukum kedua istilah tersebut dianggap sama terutama jika terkait dengan istilah hukum/ perjanjian konstruksi atau hukum/ perjanjian pemborongan. Jadi dalam hal ini istilah konstruksi dianggap sama, karena mencakup keduanya yaitu ada konstruksi

¹⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 36.

(pembangunannya) dan ada pengadaan barangnya dalam pelaksanaan pembangunan.²⁰

Asas-asas dalam hukum perjanjian dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu asas-asas umum dan asas-asas menurut doktrin yang mengacu kepada undang-undang, yang dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan menurut para ahli hukum.

Kontrak pada dasarnya harus memenuhi seluruh asas dalam hukum perjanjian, hal ini juga berlaku bagi perjanjian baku agar tidak terjadi masalah di kemudian hari apabila perjanjian baku tersebut tidak memenuhi asas-asas dalam hukum perjanjian tersebut.

Selain itu menurut Munir Fuady, prinsip-prinsip hukum yang mendukung eksistensi perjanjian baku tersebut antara lain:²¹

a. Prinsip Kesepakatan Kehendak Dari Para Pihak

Meskipun dalam suatu perjanjian baku disangsikan adanya kesepakatan kehendak yang benar-benar seperti yang diinginkan oleh para pihak, tetapi kedua belah pihak akhirnya juga menandatangani perjanjian tersebut.

b. Prinsip Asumsi Resiko Dari Para Pihak

Suatu perjanjian, setiap pihak tidak dilarang untuk melakukan asumsi resiko. Artinya bahwa jika ada resiko tertentu yang mungkin terbit dari suatu perjanjian, tetapi salah satu pihak bersedia menanggung resiko tersebut sebagai hasil dari tawar-menawar, maka jika memang kemudian resiko tersebut benar-benar terjadi, pihak yang mengasumsikan resiko tersebutlah yang harus menanggung resikonya.

c. Prinsip Kewajiban Membaca

Sebenarnya dalam ilmu hukum perjanjian diajarkan bahwa ada kewajiban membaca bagi setiap pihak yang akan menandatangani perjanjian.

d. Prinsip Kontrak Mengikuti Kebiasaan

Memang telah menjadi kebiasaan sehari-hari bahwa banyak perjanjian yang dibuat secara baku. Karena perjanjian baku tersebut menjadi terikat,

²⁰ Munir Fuady, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, (Bandung: Citra Aditya Kartini, 1998), hlm. 12.

²¹ Mariam Darus Badruzaman, *Asas-Asas Kebebasan Berkontrak dan Kaitannya Dengan Perjanjian Baku (Standart) dalam Media Notarial*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 42.

antara lain juga karena keterikatan suatu perjanjian tidak hanya terhadap kata-kata yang ada dalam perjanjian tersebut, tetapi juga terhadap hal-hal yang bersifat kebiasaan. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 1339 KUHPerdota.

Ternyata apabila ditinjau dari segi aplikasi perjanjian baku, terdapat beberapa masalah yuridis yang sering kali terjadi, antara lain:²²

- a. Sampai batas-batas tertentu, faktor keadilan menghendaki penafsiran perjanjian yang bertentangan dengan isi dari perjanjian baku tersebut;
- b. Isi klausul baku, yang dalam hal ini merupakan klausul konveksi (sudah jadi) sering bertentangan dengan isi lainnya dari perjanjian yang merupakan hasil dari negosiasi;
- c. Isi klausul baku, yang sebenarnya merupakan suatu *Corpus alienum* (bagian yang asing) terhadap perjanjian tersebut secara keseluruhan, sehingga klausul baku tersebut sering tidak berhubungan dengan isi perjanjian secara keseluruhan.

Prinsip lainnya adalah prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam hubungannya dengan perjanjian baku adalah sesuai dengan pengaturan pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa dalam suatu perjanjian baku dilarang dengan ancaman bahwa perjanjian baku tersebut menjadi batal demi hukum apabila dalam perjanjian baku tersebut menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Simpulan

Berdasarkan hasil uraian dari pembahasan pada tesis ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perwujudan asas keseimbangan dalam klausul baku perjanjian pemborongan pekerjaan di PT. PLN (Persero) Area Malang masih belum memberikan keseimbangan dalam hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak terutama dalam hal pemenuhan prestasi oleh pihak PLN Area Malang terhadap kontraktor. Ada beberapa klausul di dalam perjanjian yang dapat merugikan pihak penyedia jasa dan hal tersebut tidak dapat diubah karena perjanjian pemborongan pekerjaan di PT. PLN (Persero) Area Malang merupakan perjanjian baku yang dirancang secara sepihak oleh pihak PLN

²² *Ibid.*, hlm. 85.

Malang tanpa melibatkan pihak kontraktor. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain (a) standarisasi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, (b) adanya klausul eksonerasi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, (c) banyaknya saingan perusahaan kontraktor di kota Malang, (d) keterlambatan atau ingkar membayar prestasi oleh PLN Malang, (e) Peran notaris tidak dilibatkan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan.

2. Kurangnya perlindungan hukum para pihak dalam klausul baku perjanjian pemborongan pekerjaan yang menjadi satu permasalahan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan di PT. PLN (Persero) Area Malang karena dalam klausul perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat sepihak oleh PLN Malang tidak mencerminkan asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan yang menjadi sendi utama pembentukan suatu perjanjian. Dalam menganalisis dan memberikan solusi mengenai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak, berdasarkan data di lapangan, penulis berkesimpulan untuk menggunakan bentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif dalam penyelesaian wanprestasi di PLN Area Malang.
3. Formasi klausul baku dalam perjanjian pemborongan pekerjaan berdasarkan pada hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemborongan pekerjaan haruslah seimbang dan saling menguntungkan satu sama lain sesuai dengan aspek hukum dan prinsip-prinsip hukum perjanjian. Pihak PLN Malang seharusnya menerapkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan jalan membuat perjanjian baku yang rumusannya sesuai dan tidak bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen tersebut.

Berdasarkan hasil pembahasan dari rumusan masalah tesis ini, adapun saran yang diberikan antara lain:

1. Kepada penyedia jasa sebaiknya mempelajari terlebih dahulu mengenai peraturan-peraturan yang terkait dengan perjanjian pemborongan pekerjaan. Sehingga dapat lebih memahami klausul-klausul yang ada dalam perjanjian pemborongan pekerjaan yang mereka sepakati dengan pengguna jasa.
2. Untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak khususnya pihak kontraktor dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, para pihak sebaiknya melibatkan notaris dalam proses pembuatan perjanjian

pemborongan pekerjaan. Notaris dapat memberikan nasihat hukum kepada para pihak tentang klausul-klausul yang terdapat di dalam suatu perjanjian yang diinginkan oleh para pihak dan menerangkan resiko yang dihadapi mereka.

3. Wujud perjanjian baku antara penyedia jasa dan pengguna jasa bukanlah merupakan suatu bentuk perjanjian yang layak menurut hukum. Maka dalam hal ini seharusnya pihak PLN Malang memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian terutama syarat sahnya perjanjian, Undang-Undang Konsumen dan Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 0527.K/DIR/2014, serta Surat Edaran Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Persero) agar wujud perjanjian yang dibuat memenuhi asas keseimbangan dalam hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badruzaman, Mariam Darus. *Asas-Asas Kebebasan Berkontrak dan Kaitannya Dengan Perjanjian Baku (Standart) dalam Media Notarial*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Djumialdji. *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Fuady, Munir. *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*. Bandung: Citra Aditya Kartini, 1998.
- Hernoko, Agus Yudha. *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Laksbang Mediantama, 2008.
- Keraf, A. Sonny. *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Rawls, John. *A Theory of Justice: Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Simamora, Sogar. *Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia)*. Surabaya: Laksbang Justitia, 2013.
- Simamora, Yohanes Sogar. *Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah Jilid I*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Surachmad, Winarno. *Dasar dan Tehnik Research: Penelitian Metodologi Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1973.
- Syafa'af, Rachmad. *Strategi Penelitian dan Penyusunan Penulisan Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press, 2008.
- Tobing.G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1983.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang *Jasa Konstruksi*.

Surat Edaran Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014 tentang
Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Persero).